



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Minta Pemrov Perbanyak CCTV demi Wujudkan Kota Aman

Gambir, Warta Kota

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) agar memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV). Hal itu guna mewujudkan Kota Jakarta yang aman.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi A Ima Mahdiah mengatakan, penambahan CCTV sebaiknya diprioritaskan dalam anggaran tahun 2025.

Namun perlu ada petugas operator CCTV untuk memantau dan mengawasi aktivitas di setiap wilayah. Kata dia, penambahan CCTV sebagai bentuk pencegahan tindak kriminalitas.

"Bukan hanya CCTV-nya, tapi juga operatornya. Jangan sampai operatornya malah tidak memonitor," ujar Ima dari keterangannya pada Rabu (30/10/2024).

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut dia, CCTV dibutuhkan untuk mewujudkan Jakarta sebagai safe city.

Oleh karena itu, Pemprov DKI harus memenuhi kebutuhan ideal, yakni 70.000 CCTV.

Jumlah tersebut mengacu pada hasil kajian PWC pada tahun 2017. Hingga kini, baru ada 4.191 titik CCTV yang terpasang di Jakarta.

Salah satu upaya untuk mempercepat target pemenuhan CCTV, yakni membuat regulasi untuk mengintegrasikan CCTV pribadi dengan Pemprov DKI.

"Kita baru 4.191, kekurangannya pertama alternatif dari CCTV private setiap mal, (tempat-Red) keramaian dan kafe pasti punya CCTV, kenapa itu gakdiintegrasikan saja," ujar Mujiyono.

Sementara itu Plt Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyatakan, pihaknya berupaya memperbanyak pengadaan CCTV di Jakarta pada tahun 2025.

Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengintegrasikan akses jaringan CCTV ke Dashboard Command Center.

"Pada penyelenggaraan manage service, kita juga berkoordinasi dengan Polda metro dan Kodam Jaya," pungkasnya.

Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025. Anggaran yang disetujui itu mencapai Rp 91,14 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta

Khoirudin mengatakan, nilai APBD itu terdiri dari pendapatan daerah Rp 81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,45 triliun. Kemudian belanja daerah sebesar Rp 82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,81 triliun.

Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi pekan lalu. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak CCTV dan petugasnya.

Pemintaan itu masih sangat minimnya kebutuhan Managed Service CCTV, khususnya untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas. "Komisi A mengingatkan pentingnya untuk menyediakan tenaga monitoring yang memadai," ucap Mujiyono. (faf)



Ima Mahdiah